



Dintib Awasi Titik Masuk Gepeng

■ Yulianingsih

Perda melarang masyarakat untuk memberi uang pada gepeng di jalan.

YOGYAKARTA — Jelang akhir tahun ini, Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta akan mengintensifkan penertiban terhadap gelandangan dan pengemis (gepeng). Dintib bahkan akan melakukan pengawasan di beberapa titik yang diduga menjadi jalur masuk gepeng dari daerah lain ke wilayah Yogyakarta.

Kepala Dintib Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana mengatakan, jumlah gepeng di Yogyakarta biasanya makin bertambah menjelang akhir tahun. Ia menduga karena adanya gepeng yang masuk dari daerah lain. "Karenaanya, tahun ini kita lakukan pengawasan intensif terutama di titik-titik perbatasan," ujar dia, Selasa (16/12).

Berdasarkan hasil penertiban gepeng selama ini, Nurwidi mengatakan, para gepeng ini berasal dari berbagai daerah. Sebagian besar gepeng di Kota Yogyakarta, kata dia, memang berasal dari daerah lain di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, menurut dia, ada juga gepeng yang berasal dari kawasan lain di luar DIY. Karena itulah, Dintib akan mengawasi titik masuk para gepeng dari luar daerah ini.

Di dalam kota, Dintib Yogyakarta mensinyalir ada beberapa kawasan yang menjadi favorit para gepeng mangkal. Di antaranya di Alun-Alun Utara dan Alun-Alun Kidul. Kemudian di seputar kawasan Sriwedari dan juga dekat area Taman Pinter.

Menurut Nurwidi, dinasny melakukan patroli rutin untuk meminimalisasi gepeng di sekitar kawasan tersebut dan juga menerjunkan tim pemantau. Sementara untuk lokasi bawah jembatan, menurut dia, sekarang ini sudah mulai jarang ditempati gepeng, karena lokasinya dianggap tidak nyaman.

Nurwidi mengatakan, penegakkan hukum untuk para gepeng ini menggunakan Pasal 505 KUHP. Namun, ia mengakui tidak semua gepeng yang terjaring operasi kemudian diproses sampai ke meja hijau. Biasanya, kata dia, gepeng yang diamankan ini kemudian dikirim ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan, sebelum

kemudian dikembalikan ke masyarakat. "Kalau yustisi semua, nanti penjara penuh," kata dia.

Dalam penanggulangan gepeng ini, Nurwidi pun meminta adanya peran serta masyarakat. Salah satunya terkait implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1/2014 tentang Penanganan Gepeng. Berdasarkan perda itu, ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak lagi memberikan uang kepada gepeng di jalan. Sebab, kata dia, warga yang melakukan itu bisa terancam sanksi denda. "Pembelajaran juga untuk masyarakat jangan memberi uang rekeh di jalanan, lebih baik disalurkan ke tempat yang sesuai," ujar dia.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Panti Karya Yogyakarta Waryono mengakui, banyak gepeng yang ditertibkan Dintib kemudian diserahkan kepada panti untuk menjalani pembinaan. Menurut dia, sebagian besar sudah dipulangkan ke daerahnya masing-masing, tetapi ada juga yang menjalani pembinaan lebih lanjut.

Panti Karya ini tidak hanya menampung gepeng, tetapi juga penyandang gangguan kejiwaan dan warga yang ditinggalkan keluarganya. Sepanjang tahun ini, menurut Waryono, pantinya membina sekitar 157 orang. Ia mengatakan, sudah ada 57 orang yang dikembalikan kepada keluarganya di luar DIY dan ada 116 orang yang dipulangkan juga ke keluarganya. Namun, menurut dia, ada juga warga binaan yang masih perlu menjalani pembinaan mental.

Untuk menjalankan pelayanan, UPT Panti Karya mendapatkan anggaran Rp 1,7 miliar pada tahun ini. Menurut Waryono, anggaran itu naik menjadi Rp 3,7 miliar pada tahun mendatang. Ia menilai permasalahan sosial ini memang masih banyak terjadi.

Salah satu sebabnya, kata dia, karena pola hidup malas masyarakat. "Pola hidup yang malas membawa orang mencari jalan seandainya," kata dia.

Pada Selasa ini, UPT Panti Karya menikahkan empat pasangan pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta. Empat pasangan ini sebelumnya merupakan warga binaan Panti Karya karena berstatus sebagai penyandang masalah sosial. Waryono mengatakan, empat mantan itu sudah dinyatakan lulus sebagai warga binaan dan telah kembali ke masyarakat dengan pekerjaan dan tempat tinggal tetap.

■ ed: irfan fitrat

Kepala

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 31 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005